

REKAP 2A: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA :
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

2. UNIT ORGANISASI :
02 - Dewan Perwakilan Daerah

3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG :
01 - Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi
02 - Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI
03 - Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya
04 - Terselenggaranya dukungan penelitian/kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang sesuai dengan wewenang dan tugas DPD RI
05 - Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan Daerah yang optimal
06 - Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI
07 - Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien

4. PROGRAM :
Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan

5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2024 (RIBU)
Total		0,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Meningkatnya kepuasan anggota DPD RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Setjen DPD RI		580.463.430,0
01.01	Tingkat Kepuasan Anggota DPD RI dan alat Kelengkapan atas layanan deputi persidangan	3.4	
02	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, kajian dan perancangan oleh DPD RI dan Alat Kelengkapan		0,0
02.01	Rasio total penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan serta data yang dihasilkan oleh DPD RI dan Alat Kelengkapan terhadap total penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan yang disusun	81	
03	Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat yang optimal		0,0
03.01	Rasio total hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah yang dihasilkan terhadap total pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah yang disusun	76	
04	Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang professional sesuai wewenang DPD		0,0
04.01	Rasio total draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan terhadap total draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang disusun	85	
05	Terselenggaranya dukungan legislasi		0,0
05.01	Rasio total draft hasil Rancangan Undang-Undang yang dihasilkan terhadap total draft hasil rancangan Undang-Undang yang disusun	83	
06	Terselenggaranya dukungan anggaran serta produk DPD lainnya		10.872.547,0

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
06.01	Rasio total draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang dihasilkan terhadap total draft pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang disusun	90	
06.02	Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan	90	
07	Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang sesuai aturan		13.641.118,0
07.01	Tingkat kepatuhan pelaksanaan dukungan sidang dan rapat DPD RI	100	
Total			604.977.095,0

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Draft Keputusan/Peraturan DPD RI dan Materi yang Digunakan sebagai Keputusan/Peraturan DPD RI Terkait Tugas Komite I, Komite III, PPUU, BULD, dan BKSP	83.946.731,0
01.01	Jumlah Penyusunan RUU Inisiatif Tugas dan Fungsi DPD RI	
01.02	Jumlah Penyusunan Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD RI Atas RUU Tertentu	
01.03	Jumlah Penyusunan Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU	
01.04	Jumlah draft hasil pemantauan dan evaluasi ranperda atau perda dan draft laporan pelaksanaan tugas BULD lainnya	
01.05	Jumlah Usul Prolegnas DPD RI	
01.06	Jumlah UU hasil pemantauan dan peninjauan DPD RI	
01.07	Jumlah penyusunan kesepakatan, koordinasi, dan fasilitasi terkait pengembangan hubungan kerjasama dengan parlemen negara sahabat, organisasi internasional serta kerjasama antara pemda dan luar negeri	
02	Jumlah Kegiatan/Layanan Kesekretariatan Terhadap Kegiatan Pimpinan DPD RI dalam Rangka Penguatan Kelembagaan DPD RI	37.000.000,0
02.01	Fasilitasi Kegiatan Pemasarakatan Keputusan DPD RI dalam Lingkup Nasional/Internasional	
02.02	Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan DPD RI, Anggota DPD RI dan Pimpinan Setjen DPD RI	
02.03	Fasilitasi kegiatan Pertemuan/konsultasi Pimpinan DPD RI dengan Lembaga Negara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Praktisi LSM Mahasiswa dan Kelompok Masyarakat yang terfasilitasi	
03	Draft Keputusan/Peraturan DPD RI Dan Materi Yang Digunakan Sebagai Keputusan/Peraturan DPD RI Terkait Tugas KOMITE II, KOMITE IV, PANMUS, BAP, PURT, dan BK	479.580.364,0
03.01	Jumlah RUU Inisiatif Tugas dan Fungsi DPD RI	
03.02	Jumlah Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD RI	
03.03	Jumlah Penyusunan Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU	
03.04	Jumlah Pertimbangan DPD atas Calon Anggota BPK	
03.05	Jumlah materi Pembentukan dan Penyusunan Pelaksanaan Tugas Sidang Paripurna/Panmus/Pansus DPD RI	
03.06	Jumlah rekomendasi atas tindaklanjut IHPS BPK yang berindikasi kerugian negara	
03.07	Jumlah rekomendasi atas tindaklanjut pengaduan masyarakat	
03.08	Jumlah Rekomendasi Arah Kebijakan Anggaran Kerumahtanggaan DPD RI dan Kebijakan Pengelolaan Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi	
03.09	Jumlah Putusan Peraturan DPD tentang tata tertib, kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan.	
03.10	Jumlah Putusan/Rekomendasi atas Pengaduan dan/atau Temuan Badan Kehormatan terhadap dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah.	

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2024 (RIBU)
04	Bahan Kajian Penelitian, Materi Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, dan bahan kajian kebijakan anggaran daerah kepada Akel DPD RI.	2.325.000,0
04.01	Jumlah Pengkajian dan Desiminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah	
04.02	Jumlah Pengelolaan Pusat Informasi Anggaran dan Pengkajian Anggaran Pusat dan Daerah	
05	Bahan kajian kebijakan, perancangan hukum dan perundang-undangan, dan pengembangan jaringan informasi hukum pusat dan daerah.	2.125.000,0
05.01	Frekwensi Perancangan, Pemantauan Perundang-undangan dan Pengkajian Kebijakan	
05.02	Jumlah Dokumentasi Hukum dan Pengembangan Jaringan Hukum Pusat dan Daerah	
05.03	Jumlah Pengelolaan Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum (Law Center)	
Total		604.977.095,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024											PRAKIR/ KEBUTUHAN	
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2025	2026
3858	Pengelolaan Kesekretariatan Pimpinan DPD	37.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37.000.000,0	0,0	0,
3863	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD	83.946.731,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83.946.731,0	0,0	0,
3864	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Oleh Anggota DPD RI	479.580.364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	479.580.364,0	0,0	0,
3962	Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah	2.325.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.325.000,0	0,0	0,
3963	Perancangan Perundang-undangan dan Pengkajian Kebijakan Hukum	2.125.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.125.000,0	0,0	0,
Total		604.977.095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	604.977.095,0	0,0	0,

